

2022

LKjIP

BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 dibuat sebagai bahan untuk Penyusunan LKjIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.

Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan, sehingga pada tahun yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan lebih baik lagi.

Mamuju, 21 Februari 2023

Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan

H. Masriadi Nadi Atjo, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 197708052002121009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Issu Strategis	3
1.5. Sumber Daya Aparatur	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	7
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis	7
2.2. Indikator Kinerja Utama	9
2.3. Perjanjian Kinerja	9
BAB III	10
AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	12
3.3. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV	35
PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2
Gambar 3. 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	15
Gambar 3. 2. Peta Potensi Daerah	17
Gambar 3. 3. Daftar Koordinator Perbankan untuk Program Klasterisasi UMKM di Kabupaten	18
Gambar 3. 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	20
Gambar 3. 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) Ketersediaan BBM hingga akhir tahun.....	21
Gambar 3. 6. Pelaksanaan Seleksi Komisaris/Direksi PT. Sulawesi Barat Malaqbi	24
Gambar 3. 7. Pelaksanaan Rapat Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	25
Gambar 3. 8. Pelaksanaan Rapat Ranpergub BLUD dan Kunjungan Calon BLUD SMK.....	26
Gambar 3. 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bersumber dari APBD	28
Gambar 3. 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	30
Gambar 3. 11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Fisik bersumber dari dana APBD dan APBN	31
Gambar 3. 12. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Penginputan dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2022	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Banyak PNS Dirinci Menurut Kelompok Jabatan	6
Tabel 1. 2. Banyak PNS Dirinci Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1. 3. Banyak PNS Dirinci Menurut Golongan/Ruang	6
Tabel 1. 4. Jumlah PTT dirinci Menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2. 1. Tabel IKU	9
Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
Tabel 3. 1. Kategori Capaian Kinerja	10
Tabel 3. 2. Pengukuran Capaian Kinerja	11
Tabel 3. 3. Realisasi Capaian Kinerja Bagian	11
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Biro	12
Tabel 3. 5. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. Kebijakan Perekonomian dan SDA	13
Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Bag. Kebijakan Perekonomian dan SDA	13
Tabel 3. 7. Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Daerah	14
Tabel 3. 8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Sektor Keuangan	18
Tabel 3. 9. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. BUMD dan BLUD	22
Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran Bag. BUMD dan BLUD	22
Tabel 3. 11. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. Administrasi Pembangunan	26
Tabel 3. 12. Realisasi Anggaran Bag. Administrasi Pembangunan	27
Tabel 3. 13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bersumber dari APBN	29
Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Untuk itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, kemudian dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dievaluasi secara obyektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) disusun berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Unit Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai salah satu unit mandiri berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 berisi informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam tahun mendatang.

1.2. Gambaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah:

1. Tugas Pokok

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

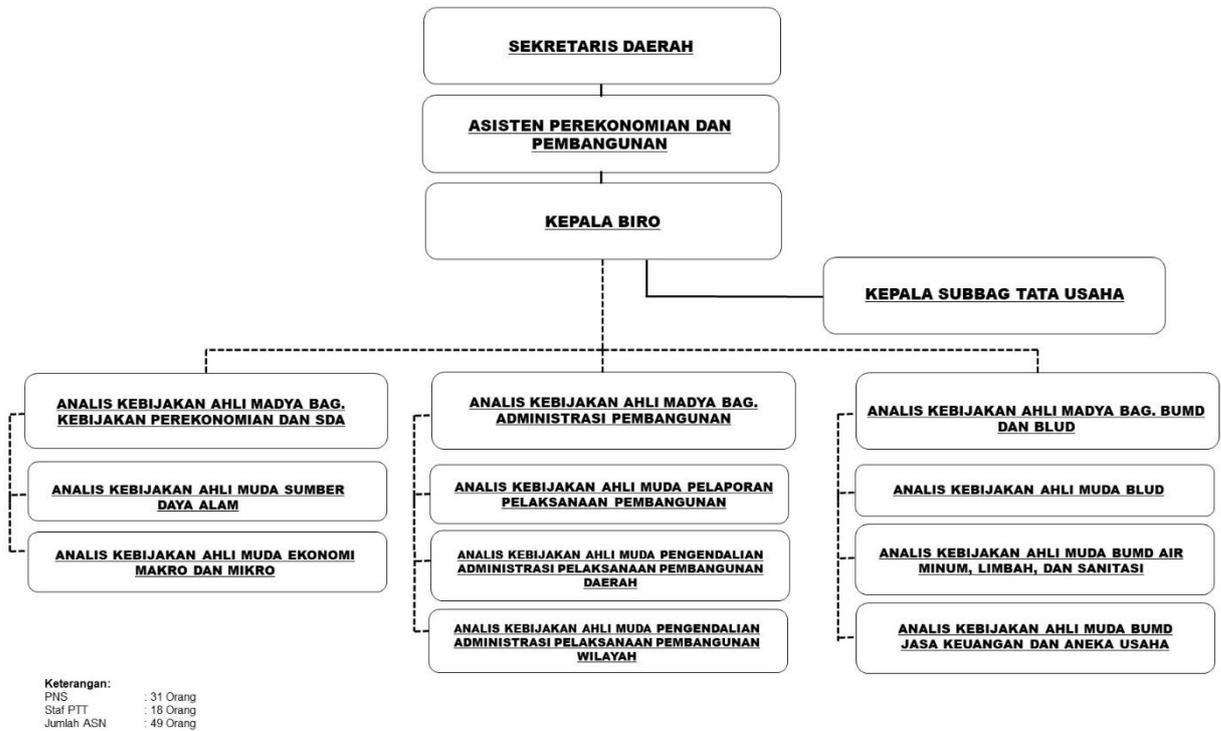
kebijakan di bidang kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Administrasi Pembangunan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Administrasi Pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan membawahi:

a. Subbagan Tata Usaha;

Subbagan Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelola barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- 4) Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- 6) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ DAN LPPD lingkup biro;
- 7) Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- 8) Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- 9) Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 10) Melaksanakan pembinaan pegawai ASN.
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang belum terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Adapun Isu strategis pada Biro Perekonomian dan Administrasi terkait permasalahan-permasalahan pembangunan yang dianggap prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022

dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2017-2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru;
- b. Akurasi data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
- c. Belum optimalnya instrumen dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kuantitas dan kompetensi aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

SDM merupakan aset utama dalam sebuah organisasi dan perlu perlakuan khusus dalam pengelolaan tenaga kerja karena pada dasarnya dapat mempengaruhi eksistensi organisasi dimasa yang akan datang. Rendahnya aspek kuantitas atau jumlah SDM yang mengakibatkan masih terdapatnya kekosongan staf pada beberapa sub bagian menandakan distribusi beban kerja tidak merata dan proporsional yang sangat mempengaruhi kualitas kinerja organisasi.

- b. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, SDM selalu menjadi subjek dan objek pembangunan untuk itu keberhasilan sangat mungkin dicapai manakala peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur serta mekanisme kerja yang bertalian dengan manusia itu saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian dan pencapaian strategis.

- c. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;

Dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah, kemajuan daerah dapat dicapai, termasuk di dalamnya pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program – program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program tersebut.

Guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan kompetensi PNS diperlukan sistem pembinaan yang mampu memberikan kesinambungan terjaminnya hak dan kewajiban PNS dengan misi tiap organisasi pemerintah. Demikian juga untuk memotivasi kinerja PNS perlu disusun pola karir dan pengembangan karir yang memungkinkan potensi PNS dikembangkan secara optimal. Mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Penerapan pola kerja yang baik mampu memperkuat pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Pentingnya komitmen yang tinggi oleh pimpinan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada lingkup biro secara terencana, terarah dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan ini dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik (*best practice*).

- d. Belum optimalnya pendanaan dan penganggaran dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kemampuan daerah yang masih terbatas terjadi karena dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan pendapatan asli daerah guna mendukung pencapaian tujuan/sasaran masih minim, sehingga mempengaruhi postingan alokasi anggaran belanja yang kurang memadai. Ini tentunya akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian tujuan sasaran percepatan pembangunan perekonomian di Sulawesi Barat.
Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Namun sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan yaitu masih adanya ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan. Dua hal ini tentunya akan menyebabkan adanya *overspending*, *underspending*, *misspending*, dan *fraud spending*.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah:

- a. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintah;
- b. Masih banyaknya terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah;
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja;
- d. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat.

1.5. Sumber Daya Aparatur

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia penggerak, pada organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi dan mampu mewujudkan program-

program organisasi yang direkomendasikan di dalam perencanaan operasional kegiatan sebagai penjabaran dari rencana strategi organisasi.

Tabel 1. 1. Banyak PNS Dirinci Menurut Kelompok Jabatan

Tenaga Struktural			Tenaga non Struktural	Jumlah
Es. II	Es. III	Es. IV		
1	3	9	18	31

Tabel 1. 2. Banyak PNS Dirinci Menurut Jenis Kelamin

Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
14	17	31

Tabel 1. 3. Banyak PNS Dirinci Menurut Golongan/Ruang

I				II				III				IV				Jumlah
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
-	-	-	-	-	1	3	-	5	5	7	4	3	2	1	-	31

Selain PNS, pada tahun 2022 di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan juga dipekerjakan pegawai tidak tetap/PTT sebanyak 17 orang. Berikut tabel pegawai tidak tetap menurut tingkat pendidikan

Tabel 1. 4. Jumlah PTT dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	S.I	S.2	S.3	Jumlah
-	-	-	4	-	-	2	11	-	-	17

1.6. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Gambaran Umum Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 - 1.3. Struktur Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 - 1.4. Isu Strategis
 - 1.5. Sumber Daya Aparatur
 - 1.6. Sistematika Penulisan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan pembangunan di bidang Pemerintahan Umum Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terutama dalam membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai unsur penyelenggara negara Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rumusan visi dan misi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan.

Bertolak pada pokok-pokok kebijakan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017-2022 serta kondisi eksternal yang selalu berubah secara dinamis, maka setiap domain dalam pemerintahan yang baik harus

memiliki visi yang strategis. Tanpa visi yang strategis baik itu visi pemerintahan, visi Gubernur maupun visi Sekretariat Daerah. Adapun visi Gubernur periode 2017-2022 yaitu:

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: Misi Pertama, Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya, yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Misi Kedua, Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya, yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis, yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan

Misi Keempat, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau *steady growth* dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.

Misi Kelima, Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. Yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

2.2. Indikator Kinerja Utama

VISI	:	“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”
MISI	:	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
TUJUAN	:	Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Tabel 2. 1. Tabel IKU

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terlaksananya pelayanan administratif di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja Utama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan merujuk pada Renstra Perubahan 2017 – 2022 yaitu Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan , yang didapatkan dari akumulasi persentase capaian indicator program yang ada pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Adapun formulasi pengukurannya dijabarkan sebagai berikut:

$$IKU = \frac{\text{Capaian IK Program A} + \text{Capaian IK Program B}}{\text{Jumlah Program}}$$

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berikut tabel perjanjian kinerja tahun 2022.

Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan	100%
		Persentasi Fasilitas Kebijakan Perekonomian	100%

Program :

	Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 734.791.153,-
Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 826.963.195,-
Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 298.998.385,-
Jumlah	Rp. 1.860.752.733,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam perkembangan paradigma pemerintahan saat ini akuntabilitas bukan hanya mencakup bagaimana anggaran digunakan tetapi bagaimana dengan keuangan yang tersedia dapat menghasilkan kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif. Gambaran ini bermaksud mengarahkan perubahan paradigma pemerintahan dari pemerintahan yang berorientasi input menjadi pemerintahan yang berorientasi hasil.

Keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dapat diketahui melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang berhasil dicapai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun cara yang digunakan untuk mengukur pencapaian target indikator kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Rata-rata Capaian Kinerja = $\frac{\text{Jumlah \% Capaian dari tiap-tiap Sasaran}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran}}$
2. Dengan tabel Kategori Capaian Kinerja.

Memperhatikan rumus pada angka 1 (satu), rata-rata capaian kinerja diperoleh dengan menjumlahkan nilai capaian tiap-tiap sasaran, kemudian dibagi dengan banyaknya indikator sasaran yang akan dicapai. Sementara tabel kategori capaian kinerja pada angka 2 (dua) memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari nilai capaian yang telah diukur. Sehingga dari kedua cara ini bisa diketahui nilai dan tingkat keberhasilan dari capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022.

Tabel 3. 1. Kategori Capaian Kinerja

Capaian Target(%)	Kategori Capaian Kinerja
85 s/d 100	Berhasil
70 s/d 84	Cukup Berhasil
55 s/d 69	Kurang Berhasil
0 s/d 54	Tidak Berhasil

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja serta target yang akan dicapai. Adapun persentase capaian kinerja yang memuat indikator kinerja, target dan realisasi yang menjadi fokus pembahasan yaitu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya pelayanan administratif di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	80,32	100	100	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan terhadap capaian kinerja yang signifikan dari Tahun 2021. Peningkatan ini tentu saja tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi internal juga bersama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Realisasi dari capaian indikator sasaran tersebut pada tabel diukur dari capaian indikator sasaran 3 (tiga) Bagian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu:

Tabel 3. 3. Realisasi Capaian Kinerja Bagian

No	Bagian	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Makro	100	4	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	75	4	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	4	4	100
Jumlah Capaian Kinerja			93,75	12	12	100
2	BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	70,59	12	12	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	80	4	4	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	100	1	1	100
Jumlah Capaian Kinerja			77,78	17	17	100
3	Adminsitirasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-	4	4	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	35,29	4	4	100

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Paembangunan Wilayah	100	4	4	100
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	100	4	4	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	-	1	1	100
Jumlah Capaian Kinerja		69,44	17	17	100

Rekapitulasi capaian kinerja masing-masing Bagian sebagai berikut:

$$Total\ Kinerja = \frac{\% \text{ Jumlah Capaian Bagian 1} + \% \text{ Jumlah Capaian Bagian 2} + \% \text{ Jumlah Capaian Bagian 3}}{Total\ Maksimal\ \% \text{ Capaian Kinerja}} \times 100$$

$$100\% = \frac{100 + 100 + 100}{300} \times 100$$

Dari formula perhitungan diatas, Capaian Kinerja pada tahun 2022 mencapai **100%**, sehingga dengan memperhatikan tabel standar pengukuran kinerja, capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 termasuk dalam kategori **“Berhasil”**.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran:

“Terlaksananya pelayanan administratif di bidang Perekonomian dan Pembangunan”

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut:

Indikator Sasaran

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Biro

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya pelayanan administratif di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	80,32	100	100	100

Berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada tabel di atas, dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar **100%** dapat disimpulkan bahwa pencapaian Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 tergolong **Berhasil**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung capaian kinerja masing-masing bagian yang ada pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, adapun capaian masing-masing bagian dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Adapun data capaian pada bagian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. Kebijakan Perekonomian dan SDA

No	Bagian	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Makro	100	4	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	75	4	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	4	4	100
Jumlah Capaian Kinerja			93,75	12	12	100

Capaian kinerja Bagian Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sejumlah 100% dengan kategori Capaian Kinerja Berhasil. Hal ini didukung dengan jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan sesuai dengan target telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Bagian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Bag. Kebijakan Perekonomian dan SDA

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	99,68
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	99,41
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	99,77
Jumlah Rata-rata Realisasi Anggaran		99,62

- 1) Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro yaitu terlaksananya kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) yang rutin dilaksanakan 3 (tiga) kali setiap tahunnya dan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang pertemuannya dilakukan setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri via *Zoom Meeting*. *High Level Meeting* (HLM) merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkesinambungan. Ini merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Komitmen Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam menekan laju inflasi ditandai dengan proyeksi inflasi Sulawesi Barat dibawah Nasional yaitu:

Tabel 3. 7. Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Daerah

	Nasional	Prov. Sulawesi Barat
Inflasi Bulan ke Bulan (Desember 2022 terhadap November 2022)	0,66%	0,52%
Inflasi Tahun ke Tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2022)	5,51%	4,85%

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari keanggotaan TPID yakni Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kantor Bank Indonesia (KBI), Perangkat Daerah Teknis terkait, Bulog, BUMD serta pihak terkait lainnya yang semakin erat dan mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Kebijakan yang dilakukan dalam pengendalian inflasi adalah dengan mengadakan langkah antisipasi seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, Kerjasama Antar Daerah (KAD) penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan Gerakan menanam, dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Diharapkan, TPID ke depan tidak hanya menasar persoalan yang memicu gejala harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro:





Gambar 3. 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

- 2) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro yaitu terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat dalam mendorong perekonomian masyarakat yang lebih baik melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Provinsi Sulawesi Barat untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan layanan prima bagi setiap

masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

Program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 adalah

- a) Mendorong budaya menabung sejak dini *One Student One Account (OSOA)*/Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 2103.03/1696/VII/2020 dalam Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 5811/D/HK/2019 tentang Program Simpanan Pelajar Hari Indonesia Menabung dicanangkan dalam rangka budaya menabung sejak dini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggalakkan budaya menabung dengan target *One People One Account* serta memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan dan seluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta agar menghimbau kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi untuk wajib memiliki rekening tabungan. Setiap nominal yang ditabung memiliki peran dalam mendorong peningkatan akses keuangan serta likuiditas tabungan nasional untuk mendukung pembiayaan pembangunan Nasional, dengan menyisihkan uang untuk menabung maka anak-anak akan belajar satu konsep dasar pengelolaan keuangan yang akan sangat bermanfaat jika dibudayakan hingga mereka dewasa.

- b) Optimalisasi peran BUMDES dalam mendorong digitalisasi keuangan di Desa
Pada Tahun 2022 dorongan digitalisasi keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan adanya *Refocusing* dan pengalihan anggaran masing-masing Perangkat Daerah ke kegiatan penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan kebutuhan social dan pemukiman pasca gempa tektonik dengan magnitudo 6,2.

- c) Akselerasi Penginputan Data UMKM ke dalam SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan hasil evaluasi program KUR pada tahu 2014 yang dirasa masih kurang tepat sasaran maka perlu disusun suatu aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR. SIKP sendiri merupakan sistem informasi *database* untuk calon debitur

dan debitur KUR. Tujuan penginputan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif, juga menjadi alat dalam mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program.

- d) Fasilitasi Akses Keuangan sektor unggulan daerah dengan strategi klasterisasi UMKM Melakukan pemetaan sektor unggulan daerah yang berkontribusi besar terhadap PDRB kabupaten dengan tindak lanjut pemetaan skala ekonomi dan skala intermediasi perbankan dan perasuransian terhadap masing-masing komoditas/produk unggulan masing-masing kabupaten. Selain dalam rangka memperluas akses keuangan, pemetaan ini berguna untuk memetakan kantong supply dari masing-masing komoditas di Sulawesi Barat



Gambar 3. 2. Peta Potensi Daerah

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

- *Mapping PIC Perbankan per-Kabupaten*
 Dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan daerah melalui pendekatan klasterisasi sektor unggulan dengan pola kemitraan maka diperlukan PIC Perbankan sebagai leading Bank di masing-masing Kabupaten yang disesuaikan dengan jumlah portofolio Bank terhadap komoditas unggulan daerah serta jangkauan jaringan kantor. Bank yang menjadi PIC minimal memiliki wewenang dalam mengajukan dan menyetujui kredit/pembiayaan. Namun demikian pembagian PIC ini tidak menutup kesempatan bagi Bank lain untuk melakukan ekspansi di Kabupaten tersebut.

Koordinator Perbankan untuk Program Klasterisasi UMKM Produk Unggulan masing-masing Kabupaten					
Bank Rakyat Indonesia	Bank Mandiri	Bank Negara Indonesia	Bank Tabungan Negara	Bank Sulselbar	Bank Syariah Indonesia
Mamuju Tengah	Pasangkayu	Majene	Mamuju	Mamasa	Polewali Mandar

Gambar 3. 3. Daftar Koordinator Perbankan untuk Program Klasterisasi UMKM di Kabupaten
Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

- Klasterisasi Sektor Unggulan Daerah dengan Pola Kemitraan

Saat ini TPAKD Sulawesi Barat bekerjasama dengan 6 Bank dalam menjalankan program Kredit/Pembiayaan Berorientasi Klasterisasi UMKM. 6 Bank diatas yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan Bank Sulselbar. Sejak program klasterisasi ini di luncurkan pada 3 Juni 2021, untuk spasial Sulawesi Barat.

Terdapat 24 klaster unggulan yang dijadikan model pengembangan bagi klaster lain, diantaranya Klaster Udang Vaname, Kelapa dalam, Kakao, (Pasangkayu), Pisang, Jagung, Jeruk Manis, pariwisata, Ikan Tuna (Mamuju Tengah), Pariwisata, Tenun Sikomandi, Nilam (Mamuju), Bawang Merah, Kambing, Ikan Tuna, Pariwisata (Majene), Padi, Kakao, agrowisata, Tenun Sutra (Polewali Mandar), Kopi, Pariwisata, Ikan Air Tawar, Tenun Kain Mamasa (Mamasa) Akumulasi plafond kredit dari 24 klaster unggulan dimaksud mencapai Rp 10,020 Milyar yang mayoritas dibiayai menggunakan fasilitas KUR.

e) Penguatan kapasitas dan kinerja TPAKD

TPAKD Provinsi Sulawesi barat bersama dengan OJK melaksanakan fungsi edukasi di tengah pandemic covid-19 salah satunya melalui kegiatan *Virtual, Hybrid* maupun tatap muka terbatas. TPAKD secara proaktif melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat di Sulawesi Barat dengan topik-topik edukasi seputar sektor jasa keuangan termasuk didalamnya digitalisasi sektor jasa keuangan.

Tabel 3. 8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Sektor Keuangan

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Peserta	Jenis Kegiatan
1	15 Februari 2022	Sosialisasi Petunjuk Teknis Program Kerja TPAKD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan TPAKD	Pejabat Pemda Dati 1 dan Dati 2	Online
2	17 Februari 2022	Pelaksanaan Sosialisasi SiTPAKD terbaru	Aparatur Sipil Negara	Online
3	9 Juni 2022	RAKORWIL dan PLENO TPAKD se Prov. Sulawesi Barat	Aparatur Sipil Negara	Online

4	8 Agustus 2022	Sertifikasi Anggota TPAKD dan pembelajaran mandiri melalui Learning management System (LMS) Edukasi khusus Keuangan	Aparatur Sipil Negara dan UMKM	Online
5	27 September 2022	UMKM Go Digital, Berdaya maksimal	UMKM	Online
6	29-30 Oktober 2022	Pelaksanaan Kegiatan Puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan	Aparatur Sipil Negara, Pemuka Masyarakat dan Umum	Offline / Tatap muka
7	10-11 November 2022	Bulan Fintech Nasional (BFN) dan Indonesia Fintech Summit (IFS) OJK 2022	Aparatur Sipil Negara	Hybrid dan tatap muka
8	2 Desember 2022	Sosialisasi Brewing Change: Women Empowerment in Coffee Origin Communities in Indonesia (BENTANI)	Aparatur Sipil Negara	Online
9	19 Desember 2022	TPAKD Summit 2022 Region Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Aparatur Sipil Negara, Pemuka Masyarakat dan Umum serta UMKM	Hybrid dan tatap muka

Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- belum optimalnya kampanye manfaat produk dan jasa keuangan bagi masyarakat secara masif dan terstruktur
- kantor layanan keuangan masih terkonsentrasi hanya di perkotaan sehingga belum menjangkau semua lapisan masyarakat
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat produk dan jasa keuangan khususnya bagi pelaku usaha
- membangun koordinasi dengan pihak penyedia jasa keuangan untuk meningkatkan area layanannya sampai ke pelosok daerah
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro:



Gambar 3. 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
 Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 Tahun 2022

- 3) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yaitu pemantauan pasokan kuota BBM bersubsidi, BioSolar dan LPG 3kg. Adapun kendala yang dihadapi yaitu masih seringnya ditemukan kelangkaan BBM bersubsidi dan Bio Solar dan tabung LPG 3kg. Ini disebabkan oleh:
- ketidaksesuaian pasokan kuota BBM bersubsidi dan BioSolar dan tabung LPG 3kg dengan permintaan kuota yang disampaikan ke pihak Pertamina
 - masih adanya oknum dari pihak SPBU yang melayani pengecer dengan pembelian yang banyak tanpa adanya surat keterangan dari Pemerintah Desa
 - keterbatasan wewenang dalam Pembinaan dan Pengawasan Distribusi/Niaga BBM oleh Pemerintah Provinsi di bidang Minyak dan Gas Bumi sehingga menyulitkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan keluhan dari masyarakat
 - Penempatan Pangkalan LPG 3Kg yang hanya menumpuk dalam satu wilayah (pasar rakyat) yang mengakibatkan masyarakat dipedesaan tidak menerima layanan penjualan LPG 3kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
 - masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
 - masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- membangun koordinasi dengan pihak Pertamina untuk memenuhi permintaan pasokan kuota BBM bersubsidi, BioSolar dan tabung LPG 3kg yang telah ditetapkan
- perlunya meningkatkan pengawasan bersama Perangkat Daerah Teknis kepada para agen distributor dalam penyaluran BBM bersubsidi, BioSolar dan tabung LPG 3kg
- perlunya merancang regulasi yang jelas mengenai wewenang dalam Pembinaan dan Pengawasan Distribusi/Niaga BBM oleh Pemerintah Provinsi di bidang Minyak dan Gas Bumi
- membangun koordinasi dengan pihak Pangkalan meningkatkan area layanannya sampai ke pelosok daerah
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air:



Gambar 3. 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) Ketersediaan BBM hingga akhir tahun

Sumber: *Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022*

b. Bagian BUMD dan BLUD

Adapun data capaian pada bagian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 9. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. BUMD dan BLUD

No	Bagian	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	70,59	12	12	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	80	4	4	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	100	1	1	100
Jumlah Capaian Kinerja			77,78	17	17	100

Capaian Kinerja Bagian BUMD dan BLUD ini sejumlah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Berhasil**. Hal ini didukung dengan jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan sesuai dengan target telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Bagian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran Bag. BUMD dan BLUD

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	98,57
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	99,48
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	98,98
Jumlah Rata-rata Realisasi Anggaran		99,01

- 1) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yaitu pembinaan dan monitoring pengelolaan PT. Sebuku Energi Malaqbi dan PT. Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat dan pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam bentuk pertemuan/rapat koordinasi dalam rangka pemberian dukungan kepada Perumda PT. Sebuku Energi Malaqbi agar dapat segera mengelola dana PI (*Participating Interest*) oleh kontraktor pengelola migas pada blok Sebuku. Aktifitas ini dianggap memberikan kontribusi positif dengan adanya pemberian kepastian dari PT. Moebadala Petroleum selaku kontraktor pengelola migas pada

Blok Sebuku untuk menyerahkan dana PI (*Participating of Interst*) pada awal Tahun 2023 mendatang.

Aktifitas lain yang terlaksana di tahun 2022 yaitu seleksi pengisian jabatan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Komisaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yaitu tahun 2022-2026 dan Direksi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2027. Proses seleksi dilakukan dari tanggal 6 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2022 yang melalui tahapan seleksi administrasi, selanjutnya pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh tim dari Universitas Negeri Makassar sebagai tim asesor, lalu uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Panitia Seleksi yang menghasilkan 3 (tiga) calon anggota Komisaris/Direksi yang dilanjutkan dengan wawancara akhir yang kemudian menetapkan 1 (satu) calon terpilih untuk nantinya menjabat sebagai Komisaris/Direksi. Tahapan terakhir yaitu pelantikan/penandatanganan kontrak kinerja yang merupakan pernyataan kesepakatan kerja dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan calon Komisaris/Direksi terpilih untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- belum efektifnya analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan bisnis BUMD yang disebabkan karena masih minimnya kompetensi/pemahaman SDM dibidangnya
- orientasi usaha yang belum jelas karena belum didasarkan pada peluang pasar dan kebutuhan daerah
- pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha belum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- meningkatkan kompetensi SDM dalam menganalisis pelaksanaan bisnis BUMD
- perlunya penajaman analisa terhadap rencana bisnis/rencana kerja BUMD
- perlunya meningkatkan pembinaan bagi BUMD untuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha:



Gambar 3. 6. Pelaksanaan Seleksi Komisaris/Direksi PT. Sulawesi Barat Malaqbi

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

- 2) Aktifitas Kegiatan yang mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yaitu Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun melibatkan Pemerintah Kabupaten terkait se-Sulawesi Barat dan pihak PDAM yang dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- belum tersedianya sarana dan prasarana uji lab kelayakan air bersih dan air minum
- belum efektifnya analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan bisnis BUMD yang disebabkan karena masih minimnya kompetensi/pemahaman SDM dibidangnya
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- mendorong upaya penyediaan sarana dan prasarana uji lab kelayakan air bersih dan air minum
- meningkatkan kompetensi SDM dalam menganalisis pelaksanaan bisnis BUMD
- perlunya penajaman analisa terhadap rencana bisnis/rencana kerja BUMD
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi:



Gambar 3. 7. Pelaksanaan Rapat Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

- 3) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yaitu Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Pembentukan BLUD SMK yang menargetkan 7 SMK yang tersebar di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk BLUD RSUD hingga saat ini belum berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diterima belum sesuai dengan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD. dikarenakan jumlah pasien yang diproyeksikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Aktifitas lain yang terlaksana yaitu penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan BLUD sebagai langkah pengefektifan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD untuk mendorong kemajuan pengelolaan BLUD. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- belum efektifnya analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan bisnis BLUD yang disebabkan karena masih minimnya kompetensi/pemahaman SDM dibidangnya
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- meningkatkan kompetensi SDM dalam menganalisis pelaksanaan bisnis BUMD

- perlunya penajaman analisa terhadap rencana bisnis/rencana kerja BUMD
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah:



Gambar 3. 8. Pelaksanaan Rapat Ranpergub BLUD dan Kunjungan Calon BLUD SMK

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tahun 2022

c. Bagian Administrasi Pembangunan

Adapun data capaian pada bagian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Pengukuran Realisasi Kinerja Bag. Administrasi Pembangunan

No	Bagian	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Adminsitrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-	4	4	100

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	35,29	4	4	100
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Paembangunan Wilayah	100	4	4	100
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	100	4	4	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	-	1	1	100
Jumlah Capaian Kinerja		69,44	17	17	100

Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ini sejumlah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Berhasil**. Hal ini didukung dengan jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan sesuai dengan target telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Bagian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12. Realisasi Anggaran Bag. Administrasi Pembangunan

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	100
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	99,87
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	99,82
4	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	99,89
5	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	99,63
Jumlah Rata-rata Realisasi Anggaran		99,84

- 1) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana APBD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk mengontrol/memantau, menilai kesesuaian pencapaian dan pengendalian pemanfaatan kegiatan dengan RPJMD untuk pembangunan yang berkelanjutan serta memitigasi dampak risiko dan kerugian akibat dari pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah kedepannya. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja
 - masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
 - masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- perlunya penajaman rekomendasi pada laporan yang disajikan
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD:



Gambar 3. 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bersumber dari APBD
*Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 Tahun 2022*

- 2) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana APBN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat yang bertujuan untuk mengontrol/memantau, menilai kesesuaian pencapaian dan pengendalian pemanfaatan kegiatan untuk pembangunan yang berkelanjutan serta memitigasi dampak risiko dan kerugian akibat dari pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah kedepannya. Aktifitas lainnya yaitu sedang digarapnya aplikasi SIPINTAR APBN yang direncanakan akan diluncurkan dan dilaksanakan uji coba penggunaannya pada Tahun 2023 mendatang dengan harapan sistem informasi pelaporan APBN ini bisa menjadi sarana bagi Pimpinan dalam melakukan memonitoring dan mengevaluasi *progress*/perkembangan realisasi Perangkat Daerah dalam mengelola dana APBN. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- perlunya penajaman rekomendasi pada laporan yang disajikan
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN:



Tabel 3. 13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan bersumber dari APBN

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

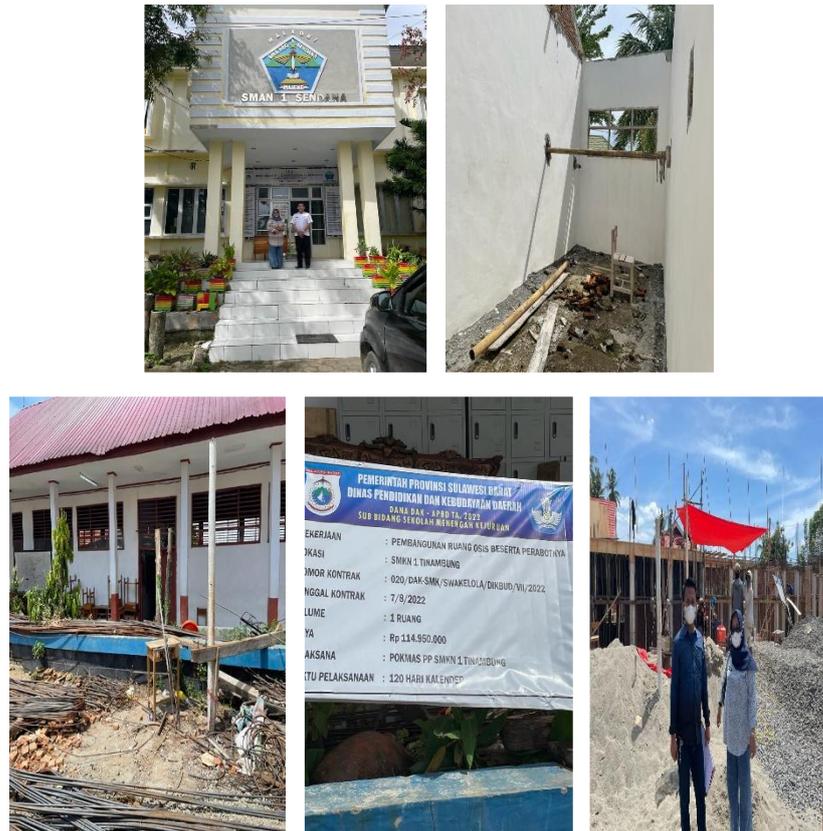
- 3) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat yang bertujuan untuk mengontrol/memantau, menilai kesesuaian pencapaian dan pengendalian pemanfaatan kegiatan untuk pembangunan yang berkelanjutan serta memitigasi dampak risiko dan kerugian akibat dari pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah kedepannya. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- perlunya penajaman rekomendasi pada laporan yang disajikan
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah:



Gambar 3. 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

- 4) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik yang bersumber dari dana APBD dan APBN se-Sulawesi Barat yang dilaksanakan per-semester bersama Bappeda dan Perangkat Daerah Teknis terkait. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna mengetahui dan menganalisis permasalahan yang terjadi yang nantinya akan dilakukan upaya perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai dengan baik. Dari hasil monitoring tersebut ditemukan beberapa pelaksanaan pembangunan fisik hanya mencapai 90% yang disebabkan oleh beberapa hal seperti keterlambatan dalam pengiriman bahan/material, Kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu dan keterlambatan dalam pencairan dana. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- perlunya penajaman rekomendasi pada laporan yang disajikan
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya responsibilitas penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi laporan (terlampir) dan dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah:



Gambar 3. 11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Fisik bersumber dari dana APBD dan APBN

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

- 5) Aktifitas kegiatan yang mendukung sub kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yaitu Pelatihan Penginputan dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran dengan tujuan untuk melatih kembali admin operator TEPRa dari semua

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk menjaga konsistensi antara serapan realisasi dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Aplikasi TEPRRA merupakan aplikasi yang bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan juga memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. TEPRRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan yaitu:

- keterlambatan tersedianya data serapan realisasi anggaran lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat yang disebabkan per-bulan Mei 2022 aplikasi TEPRRA telah dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat sehingga penginputan dan pengambilan data dilakukan secara manual
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja
- masih rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
- masih rendahnya kualitas penyajian data dan informasi

Untuk kendala-kendala dimaksud kiranya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kedepannya:

- perlunya merancang sebuah aplikasi pelaporan serapan realisasi anggaran untuk mempermudah dalam memonitoring *progress*/perkembangan serta meminimalisir dampak dari kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan
- perlunya penajaman rekomendasi pada laporan yang disajikan
- perlunya peningkatan pemahaman perencanaan kegiatan kepada SDM yang ada
- perlunya tanggungjawab penanggungjawab pelaksanaan kegiatan terhadap hasil dan manfaat kegiatan yang diberikan

Berikut dokumentasi pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah:



Gambar 3. 12. Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Penginputan dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sumber: Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan seluruh program kerja dalam rangka keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, dengan rincian anggaran persasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Persentase Pengelolaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.860.752.733	1.832.365.862	98,47	100	Efisien

Akuntabilitas keuangan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat terlaksana dengan efisien didukung dengan penerapan sistem akuntabilitas di Lingkup Pemerintahan yang berbasis aplikasi dengan basis *website* dengan seluruh aktivitas keuangan sudah melalui aplikasi berbasis *website* yang dikenal dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan dukungan aplikasi berbasis *web* lainnya untuk kegiatan pengadaan

barang dan jasa yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung keterbukaan informasi public dan transparansi pelaksanaan pemerintahan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2022.

A. Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, maupun analisis kinerjanya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum tidak sepenuhnya memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori "**Berhasil**". Dengan demikian capaian kinerja semua indikator perlu dipertahankan di tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja dalam melaksanakan kegiatan.
2. Diperlukan pengembangan kompetensi bagi setiap ASN untuk mewujudkan profesionalitas dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja/organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, hendaknya dapat terus disempurnakan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Di samping itu langkah penyebarluasan dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
5. Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

LAMPIRAN

1. PK Eselon II



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju 91512
Tlp. 0426 – 22677

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Masriadi Nadi Atjo, SE.M.Si**

Jabatan : **Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ALI BAAL MASDAR**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Februari 2022

Pihak Kedua,
Gubernur Sulawesi Barat

H.M. ALI BAAL MASDAR

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

H. MASRIADI NADI ATJO, SE.M.Si
Nip : 19770805 200212 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
 Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju 91512
 Tlp. 0426 – 22677

LAMPIRAN KINERJA TAHUN 2022
ESELON II (KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan	100%
		Persentasi Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 738.059.992	APBD
2. Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 655.000.100	APBD
3. Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 324.000.040	APBD
Jumlah	Rp. 1.717.060.022	

Mamuju, Februari 2022

Pihak Kedua,
 Gubernur Sulawesi Barat

H.M. ALI BAAL MASDAR

Pihak Pertama,
 Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
 Pembangunan

H. MASRIADI NADI ATJO, SE, M.SI
 Nip : 19770805 200212 1 009

2. Hasil Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Makro, Mikro dan SDA

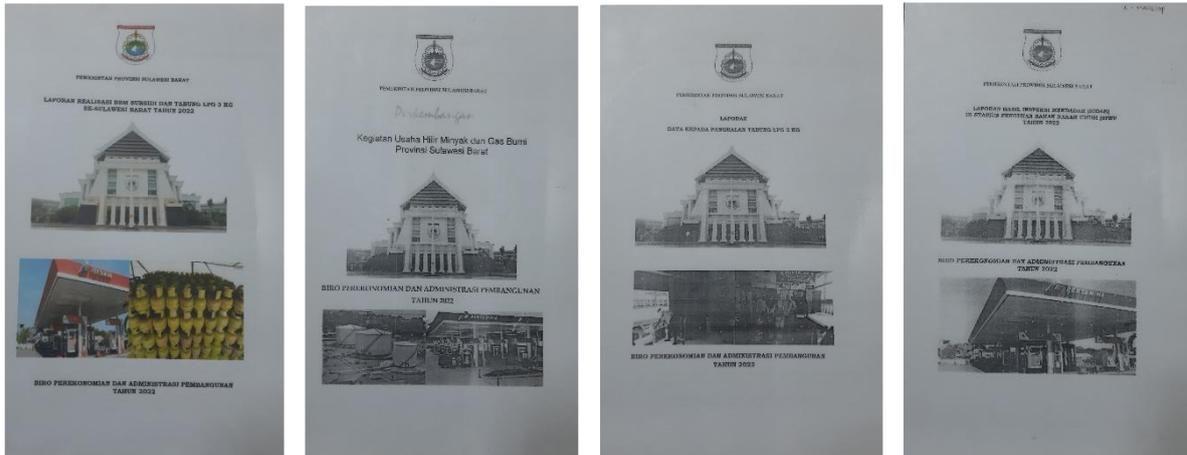
a. Laporan Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) per-triwulan



b. Laporan Pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)



c. Laporan Pelaksanaan Kebijakan Energi dan Air



3. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

a. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha



b. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi

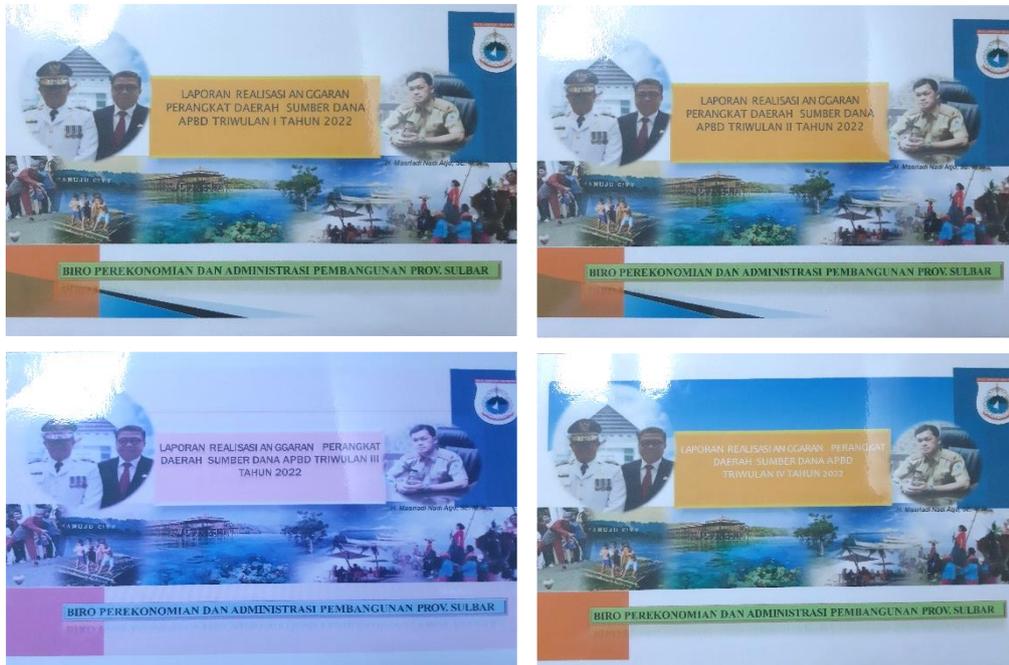


c. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BLUD



4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pembangunan

a. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD



b. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN



c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah



d. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah



e. Laporan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

